

**KEPEMIMPINAN CAMAT  
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERBATASAN ANTARNEGARA  
DI KECAMATAN TASIFETO BARAT KABUPATEN BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

*Oleh*

**Fredrik Ronald Seran<sup>1</sup>,  
Sadu Wasistiono<sup>2</sup>, Ella Wargadinata<sup>3</sup>**

<sup>1)</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Belu

Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
ronaldseran22@gmail.com

<sup>2,3)</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri

---

**ABSTRACT**

***THE LEADERSHIP OF THE CAMAT IN THE EMPOWERMENT OF INTER-STATE BORDER  
COMMUNITIES IN THE WESTERN TASIFETO DISTRICT OF BELU REGENCY  
OF EAST NUSA TENGGARA PROVINCE***

*This research is focused on the leadership of the camat in the empowerment of border communities between countries in West Tasifeto District, Belu Regency, East Nusa Tenggara Province. The purpose of this study is to know and analyze the leadership of the camat in the empowerment of inter-state border communities in West Tasifeto Sub-District of Belu Regency, factors that are the inhibition and support and starategi that must be implemented by the leadership of the camat in the empowerment of inter-state border communities in West Tasifeto Sub-district.*

*The theory used is the theory of government leadership put forward by Sadu Wasistiono with the following indicators leader, follower, situation and condition and vision and mission. Suharto's theory of community empowerment with the following indicators of Possibility, Strengthening, Protection, Support and Maintenance. The approach used in data analysis is SWOT analysis and Lintus Test which is to analyze strategies- startegi. The design of the research used is qualitative research with a deductive approach.*

*The results showed that the leadership of the camat in the empowerment of border communities between countries in The District of West Tasifeto needs to carry out the function of leadership as a leader, situation and condition, followers, and vision and mission of the organization. Then the function of community empowerment is the possibility, strengthening, protection, support and maintenance. so that the poor can have the strength, motivation, ability and skills and efforts to overcome the poverty and helplessness they face. The leadership of the district in the empowerment of border communities between countries in the western tasifeto sub-district of Belu District has not been effective so it needs to be considered and minimized factors that become inhibition and use the factors that are supporting in the implementation in the future that will be dating so that it runs effectively and makes the border community independent and productive. The strategy that can be used for the leadership of the camat in*

*the empowerment of border communities between countries in the western district of Tasifeto district Belu District, namely First, There needs to be special authority to the camat to coordinate with all sectors in the field to implement all programs empowerment of the poor with one principle, one goal for the welfare of the community. Second, Addressing the problem of water scarcity is a major obstacle to the community, such as the construction of reservoirs and drill wells. Third, Improving the quality of Human Resources of lookeu villagers, by realizing the minimum public education of SLTA and equip the poor with skills that can be used to work and seek added value.*

**Keywords:** *camat leadership, community empowerment, border area*

#### ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada kepemimpinan camat dalam pemberdayaan masyarakat perbatasan antarnegara di Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kepemimpinan camat dalam pemberdayaan masyarakat perbatasan antarnegara di Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dan strategi yang harus dilaksanakan kepemimpinan camat dalam pemberdayaan masyarakat perbatasan antarnegara di Kecamatan Tasifeto Barat.

Teori yang digunakan adalah teori kepemimpinan pemerintahan yang dikemukakan oleh Sadu Wasistiono dengan indikator sebagai berikut Pemimpin, Pengikut, Situasi dan Kondisi dan Visi dan Misi. Teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Suharto dengan indikator sebagai berikut Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalah analisis SWOT dan Lintus Test yang untuk menganalisis strategi-startegi. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan camat dalam pemberdayaan masyarakat perbatasan antarnegara di Kecamatan Tasifeto Barat perlu menjalankan fungsi kepemimpinan camat sebagai pemimpin, situasi dan kondisi, pengikut, dan visi dan misi organisasi. Kemudian fungsi pemberdayaan masyarakat, yaitu Pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. sehingga masyarakat miskin dapat memiliki kekuatan, motivasi, kemampuan dan keterampilan serta usaha-usaha untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakberdayaan yang mereka hadapi. kepemimpinan camat dalam pemberdayaan masyarakat perbatasan antarnegara di Kecamatan Tasifeto barat Kabupaten Belu belum berjalan efektif sehingga perlu diperhatikan dan diminimalisasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan menggunakan faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan pada masa yang akan datang sehingga berjalan efektif dan menjadikan masyarakat perbatasan mandiri dan produktif. Strategi yang dapat digunakan untuk kepemimpinan camat dalam pemberdayaan masyarakat perbatasan antarnegara di Kecamatan Tasifeto barat Kabupaten Belu, yaitu Pertama, Perlu adanya kewenangan khusus kepada camat guna mengkoordinasikan dengan semua sektor-sektor di lapangan untuk melaksanakan semua program pemberdayaan masyarakat miskin dengan satu prinsip, satu tujuan demi kesejahteraan masyarakat. Kedua, Mengatasi masalah kelangkaan air yang menjadi kendala besar pada masyarakat, seperti pembangunan waduk dan sumur-sumur bor. Ketiga, Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat Desa Lookeu, dengan mewujudkan pendidikan masyarakat minimal SLTA dan membekali masyarakat miskin dengan keterampilan/skill yang dapat digunakan untuk bekerja dan mencari nilai tambah.

**Kata kunci:** *kepemimpinan camat, pemberdayaan masyarakat, kawasan perbatasan*

## PENDAHULUAN

**T**ransformasi pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong perubahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Pada era globalisasi saat ini dari masyarakat menuntut pada pemerintah agar mampu menyelenggarakan fungsi-fungsi negara dengan baik guna peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintahan Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kecamatan tidak lagi merupakan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Pasal 209 ayat (2) huruf f yakni, "Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri

atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, dan Kecamatan".

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pada Pasal 10 huruf b, Tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Masalah sosial yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dapat berasal dari individu penyandang masalah, dan dapat pula terjadi akibat dari sistem yang ada dalam masyarakat. Sistem dalam masyarakat cenderung mengundang polemik yang terus berjalan tanpa ujung, di mana orang atau sekelompok orang yang berada di sekitar pusat kekuasaan akan selalu menjadi kekuatan bagi diri sendiri maupun kelompoknya, untuk menguasai orang atau kelompok yang lain, baik itu dari kepentingan ekonomi, politik, hukum dan kepentingan-kepentingan lainnya. Upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah sosial, seringkali disebut sebagai upaya pembangunan masyarakat.

Pembangunan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan kemanusiaan, dalam arti bahwa pembangunan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan juga kebutuhan psikisnya yang mendalam

serta dorongan untuk mengaktualisasikan diri. Keikutsertaan di dalam membentuk kehidupan seseorang dan masa depan masyarakat telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa, Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Wilayah perbatasan di Indonesia secara umum dicirikan oleh letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara lain. Kawasan perbatasan umumnya masih relatif terpencil, miskin, kurangnya sarana dan prasarana dasar sosial serta kondisi pertumbuhan ekonomi wilayahnya relatif

terlambat dibandingkan dengan wilayah lain di negara lain. Daerah perbatasan dihuni oleh anggota masyarakat yang tergolong miskin, jauh dari sejahtera, sangat tertinggal, serta belum tersentuh oleh program pembangunan sehingga akses terhadap prioritas pembangunan seperti infrastruktur, pemberdayaan potensi, pelayanan sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan masih sangat terbatas.

Kawasan perbatasan didalam UU No 23 Tahun 2014 dimaknai sebagai kawasan khusus, Pasal 1 angka 42 menyatakan kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Selanjutnya yang dimaksud dengan Kawasan perbatasan negara adalah kecamatan-kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain. Perbatasan antarnegara merupakan beranda depan negara yang perlu mendapat perhatian karena mempunyai peran penting dan strategis bagi perekonomian regional maupun nasional. Melalui daerah perbatasan, kegiatan perdagangan antarnegara dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan murah yang akan mendorong peningkatan aktivitas

Tabel 1 Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Belu 2019

Kecamatan	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM 2019	Status IDM 2019
Tasifeto Barat	Rinbesihat	0,7543	0,6000	0,6667	0,6737	Berkembang
Tasifeto Barat	Naitimu	0,8057	0,7833	0,6000	0,7297	Maju
Tasifeto Barat	Naekasa	0,8457	0,4667	0,6667	0,6597	Berkembang
Tasifeto Barat	Tukuneno	0,7600	0,4000	0,6667	0,6089	Berkembang
Tasifeto Barat	Lookeu	0,6571	0,4333	0,3333	0,4746	Sangat Tertinggal
Tasifeto Barat	Lawalutolus	0,7600	0,3000	0,6000	0,5533	Tertinggal
Tasifeto Barat	Derokfaturene	0,6857	0,3667	0,5333	0,5285	Tertinggal
Tasifeto Barat	Bakusatulama	0,7714	0,5167	0,5333	0,6071	Berkembang

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belu, Tahun 2019

produksi dan pendapatan masyarakat setempat, yang akhirnya berujung pada kesejahteraan masyarakat.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi yang terletak di tenggara Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Kawasan perbatasan darat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Republik Demokrat Timor Leste secara administrasi meliputi 4 kabupaten dan 13 kecamatan, yaitu:

1. Kabupaten Kupang: Kecamatan Amfoang Utara
2. Kabupaten Timor Tengah Utara: Kecamatan Miomafo Barat, Miomafo Timur dan Kecamatan Insana Utara
3. Kabupaten Belu: Kecamatan Tasifeto Timur, Tasifeto Barat, Lamaknen, Raihat, Lamaknen Selatan, Lasiolat, dan Kecamatan Nanaet Duabesi.
4. Kabupaten Malaka: Kecamatan Kobalima Timur, dan Kecamatan Kobalima.

Sebagai salah satu Provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain, yaitu di darat berbatasan dengan negara Timor Leste dan di laut berbatasan dengan Australia, posisi NTT sesungguhnya sangat strategis, baik dari aspek politik maupun ekonomi. Aspek politik berkaitan dengan menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Indonesia, sedangkan aspek ekonomi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di wilayah perbatasan serta peluang perdagangan barang dan jasa dengan negara tetangga. Begitu strategisnya wilayah perbatasan dengan negara lain, maka pengembangan kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan harus mendapatkan prioritas dalam pembangunan daerah. Skenario pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terciptanya keamanan kawasan perbatasan.

Kabupaten Belu merupakan Ibu Kota Atambua yang mempunyai Pos Lintas Batas dengan pintu gerbang utama menuju Negara Timor Leste, melalui Pintu Perbatasan Motaain yang berada di Kecamatan Tasifeto Timur dan beberapa Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste yang tidak mempunyai Pos Lintas Batas, yaitu Kecamatan Tasifeto Barat, Lamaknen, Raihat, Lamaknen Selatan, Lasiolat, dan Kecamatan Nanaet Duabesi.

Kecamatan Tasifeto Barat merupakan salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste yang perbatasannya pada Desa Lookeu, sebagai Kecamatan yang berbatasan darat dengan Negara Timor Leste. Pembangunan yang bernuansa pemberdayaan masyarakat belum menjadi perhatian utama sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang menjadi fokus utama malah pembangunan fisik infrastruktur yang seringkali menjadi garapan empuk para pebisnis lokal guna mengakses keuntungan ekonomi dari negara. Sementara pembangunan pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan dan peternakan belum menjadi perhatian serius, dan hanya sebatas pemberian bantuan bukan pemberdayaan. Situasi ini terus memposisikan masyarakat sebagai hamba pembangunan yang terus menerus mengharapkan bantuan ekonomi dari pemerintah.

Berdasarkan Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu, yaitu rekapitulasi indeks desa membangun pada kecamatan Tasifeto Barat dari 8 desa pada Kecamatan Tasifeto barat terdapat 2 desa yang tertinggal dan 1 desa yang masih sangat tertinggal, yaitu desa Lookeu yang desanya berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste.

Kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Lookeu, sering memunculkan masalah-masalah baru

seperti perbuatan kriminalitas, pencurian ternak yang dijual ke Timor Leste, dan tindakan pelanggaran hukum lainnya. Biasanya aktivitas Penyelundupan dilakukan melalui hutan, jalan setapak, dan lokasi-lokasi tersembunyi disepanjang tapal batas. Barang yang diselundupkan pada umumnya adalah, Kebutuhan Pokok dan Ternak Sapi. Perbedaan harga menjadi faktor utama untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara illegal. Patut digaris bawahi, bahwa roda perekonomian Timor Leste (terutama arus barang dan jasa) sangat tergantung pada distribusi barang dan jasa dari Indonesia terutama melalui jalur darat di Atambua.

Diperlukan langkah yang cerdas dan strategis untuk memposisikan wilayah perbatasan menjadi “beranda depan” dengan melakukan percepatan pembangunan. Percepatan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat perbatasan sehingga dapat mengurangi tingkat kejahatan dan pelanggaran hukum di sekitar kawasan perbatasan dan sangat penting untuk aspek ketahanan bangsa.

### Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Kepemimpinan Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan Antarnegara di Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung Kepemimpinan Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan Antarnegara di Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Strategi apakah yang harus dilaksanakan Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat

Perbatasan Antarnegara di Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur?

### Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada masalah yang dibuat pada latar belakang tentang Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan di Kecamatan Tasifeto Barat, maka peneliti menggunakan teori kepemimpinan pemerintahan yang dikemukakan oleh Sadu Wasistiono tentang empat hal penting dalam kepemimpinan pemerintahan yaitu; Pemimpin, Situasi dan Kondisi, Pengikut, dan Visi dan Misi Organisasi. Lebih lanjut untuk strategi pemberdayaan kepada masyarakat peneliti menggunakan teori Edi Suharto, yaitu 5P; Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan.

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Gulo penelitian deskriptif adalah: Tipe penelitian yang didasarkan pada pertanyaan dasar, yaitu “bagaimana.” Maksudnya penelitian yang dilakukan ingin mengetahui bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Dengan demikian, temuan-temuan dari penelitian deskriptif lebih luas dan lebih terperinci. Dikatakan lebih luas karena kita meneliti tidak hanya masalahnya sendiri, tetapi juga variabel-variabel lain yang berhubungan dengan masalah itu. Lebih terperinci karena variabel-variabel tersebut diuraikan atas faktor-faktornya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, penelitian dilakukan dengan menarik sampel

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka instrumen penelitian sebagaimana dinyatakan Sugiyono dan Maleong tersebut di atas adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen kunci akan terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara, menganalisis dokumen dan

melakukan observasi. Selain itu, peneliti juga dibantu dengan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara yang digunakan untuk menjaring persepsi informan lainnya.

## HASIL PENELITIAN

Kepemimpinan Camat dalam pemberdayaan masyarakat perbatasan antarnegera di Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu dengan menggunakan teori Pemberdayaan Masyarakat yang dikemukakan oleh Suharto dalam kaitannya dengan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan melalui: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan

### Pemungkinan

Pola pikir masyarakat desa lookeu yang masih rendah, sangat tergantung dan keenakan dengan program-program bantuan yang diberikan. Ketika ada bantuan, masyarakat tidak mengembangkan apa yang diberikan, mereka menggunakan bantuan itu dengan memenuhi kebutuhan, seperti bantuan ternak setelah diberikan kebanyakan masyarakat bukan mereka memelihara ternak sehingga berkembang biak, namun ketika diberikan mereka langsung jual, sehingga bantuan yang diberikan terputus tidak ada kelanjutan manfaatnya kepada masyarakat, sehingga perlu adanya evaluasi dan pengawasan terus menerus dari pemerintah.

### Penguatan

Rendahnya pendidikan, rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkembang dan beban adat yang sangat membebani masyarakat, sehingga masyarakat Desa Lookeu tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukan usaha ekonomi produktif sehingga terus berada dalam kondisi tidak berdaya. Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah berupa pelatihan, sosialisasi, bimbingan dan bantuan kepada masyarakat

namun belum disadari dan dimengerti dengan baik oleh masyarakat. Diharapkan Pemerintah Khususnya Kecamatan dan Desa berperan aktif secara terus menerus melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar dapat membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mau berusaha menjadi lebih baik dan berkembang.

### Perlindungan

Perlindungan terhadap kelompok lemah dan tidak berdaya, melalui program pemberdayaan yang dijalankan, memberikan kesempatan masyarakat kecil seluasnya untuk terlibat dalam program pemberdayaan dengan membentuk kelompok usaha ekonomi produktif, sesuai dengan kemampuan masing-masing melalui bantuan dan pembinaan yang diberikan.

### Penyokongan

Pemerintah sudah berupaya mendorong masyarakat keluar dari ketidakberdayaan ini dengan memberikan bantuan-bantuan dan memfasilitasi untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan bimbingan, motivasi dan pendampingan terkait mengarahkan masyarakat agar mengelola bantuan ini secara baik dan benar, namun kendalanya kembali lagi kepada kesadaran masyarakat, kesiapan dan sejauh mana masyarakat mau mengelola bantuan pemerintah tersebut sehingga mereka dapat keluar dari keterpurukan selama ini agar menjadi lebih baik dan mereka bisa merasakan program bantuan terkait pemberdayaan dari pemerintah.

### Pemeliharaan

Situasi dan kondisi di Desa Lookeu sangat aman, aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari berjalan normal. Program pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Lookeu telah menciptakan distribusi kekuasaan keberbagai kelompok dalam masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ingin

membangun usaha untuk terlibat langsung dalam kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat. Dengan bantuan dana pemberdayaan walaupun jumlahnya masih sangat kecil, namun masyarakat merasa terbantu untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif yang sementara mereka kembangkan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1. Faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan camat dalam pemberdayaan masyarakat perbatasan antarnegara di Kecamatan Tasifeto barat Kabupaten Belu yaitu:

a. Faktor Pendukung

- ☞ Pemberian dukungan, motivasi dan pembinaan dari camat
- ☞ Budaya kerja sama dan gotong royong yang dimiliki masyarakat Lookeu
- ☞ Lokasi desa lookeu yang berada dalam kawasan perbatasan
- ☞ Adanya komitmen dan perhatian yang besar dari pemerintah pusat untuk pembangunan kawasan perbatasan
- ☞ Adanya dana pemberdayaan masyarakat

b. Faktor Penghambat

- ☞ Kewenangan khusus kepada camat
- ☞ Koordinasi antarsektor di kecamatan
- ☞ Kualitas sumber daya manusia rendah
- ☞ Budaya konsumtif dan budaya pesta masyarakat yang masih tinggi.
- ☞ Kemarau berkepanjangan dan iklim yang tidak menentu
- ☞ Ketersediaan air sangat terbatas

☞ Rawan terjadi tindakan kriminalitas di daerah perbatasan, seperti perdagangan ilegal dan pencurian.

2. Strategi untuk mengidentifikasi kepemimpinan camat dalam pemberdayaan masyarakat perbatasan antarnegara di Kecamatan Tasifeto barat Kabupaten Belu

- Perlu adanya kewenangan khusus kepada camat guna mengkoordinasikan dengan semua sector-sektor di lapangan untuk melaksanakan semua program pemberdayaan masyarakat miskin dengan satu prinsip, satu tujuan demi kesejahteraan masyarakat.
- Mengatasi masalah kelangkaan air yang menjadi kendala besar pada masyarakat, seperti pembangunan waduk dan sumur-sumur bor.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat Desa Lookeu, dengan mewujudkan pendidikan masyarakat minimal SLTA dan membekali masyarakat miskin dengan keterampilan/skill yang dapat digunakan untuk bekerja dan mencari nilai tambah.

### Saran

1. Agar kepemimpinan camat dalam pemberdayaan masyarakat perbatasan antarnegara di Kecamatan Tasifeto barat Kabupaten Belu dapat berhasil maka perlu dijalankan fungsi kepemimpinan camat sebagai pemimpin, situasi dan kondisi, pengikut, dan visi dan misi organisasi. Kemudian fungsi pemberdayaan masyarakat, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. sehingga masyarakat miskin dapat memiliki kekuatan, motivasi, kemampuan, dan keterampilan serta usaha-usaha untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakberdayaan yang mereka hadapi.

2. Kepemimpinan camat dalam pemberdayaan masyarakat perbatasan antarnegara di Kecamatan Tasifeto barat Kabupaten Belu belum berjalan efektif sehingga perlu diperhatikan dan dimimalisasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan menggunakan faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan pada masa yang akan datang sehingga kepemimpinan camat dalam pemberdayaan masyarakat perbatasan berjalan efektif dan menjadikan masyarakat perbatasan mandiri dan produktif.
3. Strategi yang dapat digunakan untuk kepemimpinan camat dalam pemberdayaan masyarakat perbatasan antarnegara di Kecamatan Tasifeto barat Kabupaten Belu, yaitu **Pertama**, perlu adanya kewenangan khusus kepada camat guna mengoordinasikan dengan semua sector-sektor di lapangan untuk melaksanakan semua program pemberdayaan masyarakat miskin dengan satu prinsip, satu tujuan demi kesejahteraan masyarakat. **Kedua**, mengatasi masalah kelangkaan air yang menjadi kendala besar pada masyarakat, seperti pembangunan waduk dan sumur-sumur bor. **Ketiga**, meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa Lookeu, dengan mewujudkan pendidikan masyarakat minimal SLTA dan membekali masyarakat miskin dengan keterampilan/skill yang dapat digunakan untuk bekerja dan mencari nilai tambah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arimbi Horoepoetri, dan Santosa, 2003. *Peranan Pembangunan*, PT. Binakarsa, Jakarta.
- Bryson, Jhon M., 2008, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, diterjemahkan oleh Miftahudin, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bungin, Burhan, 2007, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Edi Suharto, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, PT. Refika Aditama
- Gulo, W, 2002, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta.
- Guo, Rongxing, 1996. *Border-Regional Economics*, Phyica Verl Heideberg, Germany.
- Harbani, Pasolong. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung: CV.Alfabeta.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2005, *Manajemen Pelayanan Publik*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- H.M.Aries Djaenuri, 2015, *Kepemimpinan, Etika, dan Kebijakan Pemerintahan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Henne, Aime. dkk, 2010, *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Khasan Effendy, 2010, *Sosiologi Pemerintahan*, CV Indra Prahasta, .Bandung.
- Khoriddin, 1992. *Pembangunan Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar 1996, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta, Cides.
- Labolo, Muhadam, 2012. *Memperkuat Pemerintahan Mencegah Negara Gagal*. Kubah Ilmu, Jakarta.
- Labolo, Muhadam, 2014, *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardikanto, Totok. 2010. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, University Press, Surakarta.
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko, 2015, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perpektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.

- Moleong, Lexy J, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muttalib, M.A. dan Khan, Mohd Akbar Ali, 2013. *Theory Of Local Government* (diterjemahkan oleh Tim MIPI), MIPI, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu (2011), *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rangkuti Freddy. 2008, *Analisis SWOT Tehnik Membedah Kasus Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Soetomo, 2012, *Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Siagian, P Sondang, Organisasi, 1997, *Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2013, *Sosiologi Pemerintahan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Saru Arifin, 2014, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Hayati dan Ahmad Yani, 2007, *Geografi Politik*, Refika Aditama, Bandung.
- Silalahi, Ulber, 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Unpar Press, Bandung.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Theresia, Aprillia, dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung.
- Victor Prescott and Gillian D. Triggs, 2008. *International Frontiers and Publishers*, Leiden and Boston.
- Wasistiono, Sadu, 2013, *Kepemimpinan Pemerintahan*, IPDN, Jatinangor.
- Wasistiono Sadu, Ismail Nurdin, dan M. Fahrurrozi, 2009, *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa*, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah, Fokusmedia, Bandung.
- Wasistiono, Sadu, 2003, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, CV. Fokusmedia*, Bandung.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan